

# KPK Heran Bupati Taufiqurrahman Sangat Nekat

■ Sambungan dari Hal 1

## Bunda Ita

Karena ada masalah tersebut," ujar Nyono menegaskan.

Ita Triwibawati disebut-sebut hendak maju pada Pilkada Kabupaten Nganjuk 2018. Suaminya, Taufiqurrahman, adalah bupati Nganjuk dua periode yang menjabat 2008-2013 dan 2013-2018. Ita ikut diamankan dalam OTT bersama sang suami.

Bahkan kepergian Ita ke Jakarta adalah dalam rangka mengurus rekomendasi pencalonannya sebagai Bacagub Nganjuk. "Memang kemarin beliau pamit ke Jakarta mengurus rekomendasi Parpol dalam rangka pencalonannya dalam Pilbup Nganjuk," ujar Bupati Nyono.

Nyono memastikan bahwa Kamis (26/10) kemarin Ita Triwibawati tidak kelihatan di Kantor Pemkab. "Kami nanti akan melakukan koordinasi. Sehingga kinerja Pemkab Jombang tidak terganggu dengan masalah ini. Kita tunggu kabar selanjutnya kepastian berita tersebut," ujarnya.

## Suap untuk Jual-Beli Jabatan

KPK saat ini tengah mendalami kaitan antara uang suap yang diterima Taufiqurrahman dengan pencalonan istrinya. KPK menyebut bukan kali ini saja Taufiq menerima suap untuk jual beli jabatan.

"Ita Triwibawati yang merupakan istri bupati, menurut informasi, akan nyalon bersama dengan SA (Lurah di Kabupaten Nganjuk) sebagai wakilnya. Tetapi apakah uang tersebut akan diberikan untuk itu? Ini rasanya masih dalam pengembangan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).

Menyusul OTT KPK, Taufiq ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 298 juta terkait jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Taufiq ditangkap sesuai menerima uang di salah satu hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Basaria mengatakan, KPK melakukan OTT karena menduga ada transaksi suap kepada Taufiqurrahman. Suap itu diduga diberikan untuk memuluskan para pihak yang ingin mengisi sejumlah jabatan, seperti kepala sekolah, kepala dinas, dan sebagainya.

"Yang mana untuk menduduki jabatan tersebut, orang harus memberikan uang kepada (pejabat) setempat. Hal ini ke depan perlu diperhatikan secara



**DISEGEL KPK:** Ruang Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk M Bisri disegel KPK.

serius," katanya.

Adapun suap Rp 298 juta yang membuat Taufiq tertangkap, Basaria mengatakan uang itu untuk operasional Taufiq dan istri semata. "Kalau dana yang pada saat ini, pada saat dilakukan tertangkap tangan dengan jumlah Rp 200 jutaan, rasanya ada yang nggak cukup, pasti bukan. Ini mungkin hanya untuk biaya operasional dari bupati, istri selama ada di Jakarta," ujar pimpinan KPK ini.

Basaria juga mengungkapkan, pada OTT itu, pihaknya menangkap 20 orang di dua kota. "OTT dilakukan di dua lokasi, Jakarta dan Nganjuk. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 20 orang, 12 di Jakarta, 8 di Nganjuk," katanya.

Selain Taufiqurrahman, Basaria menyebutkan, beberapa orang yang ditangkap di antaranya berinisial IH selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SUW selaku kepala SMPN 3 Kabupaten Nganjuk, MD selaku Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk, H selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan D merupakan wartawan media daring di Nganjuk.

Selain itu, beberapa orang lainnya yang ditangkap adalah istri Bupati Nganjuk yang juga Sekda Kabupaten Jombang, Direktur RSUD Kertosono, sekretaris camat, dan seorang lurah

di Kabupaten Nganjuk yang juga bakal Cawabup Nganjuk.

## KPK Heran Taufiq Nekat

Basaria juga menyatakan tak habis pikir dengan kelakuan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Kepala daerah yang pernah lolos dari penatapan tersangka KPK itu nekat menerima suap terkait jual beli jabatan.

"Kami juga bingung, nekat banget. Baru jadi tersangka, lalu praperadilan, masih nekat juga. Kami juga bingung," kata Basaria.

Taufiq ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap sebesar Rp 298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Taufiq ditangkap sesuai menerima uang di salah satu hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Taufiq sempat lolos dari jerat hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi lima proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada tahun 2009. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 6 Maret 2017 menerima sebagian permohonan praperadilan Taufiq yang saat itu sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Hakim PN Jaksel mendasarkan pertimbangan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara kepolisian, kejaksaan,

dan KPK yang ditandatangani pada 29 Maret 2012, dalam menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Taufiq.

Dalam SKB tersebut disebutkan bahwa apabila dua instansi atau lembaga menangani perkara yang sama, maka dikembalikan kepada instansi atau lembaga awal yang melakukan penyelidikan awal. Mengacu SKB ini, maka seharusnya perkara yang menyeret Taufiq dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

Pada 13 September 2017, pimpinan KPK melimpahkan sejumlah berkas perkara ke Kejaksaan Agung, salah satunya yaitu perkara Taufiq.

## Penyegelan di RSUD Nganjuk

Selain menyegel tiga ruang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Tim Satgas Komisi KPK juga menyegel ruang Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk M Bisri SE.

"Tadi malam (Rabu malam) sekitar pukul 20.00, jadi saat penyegelan berlangsung kantor dalam kondisi kosong," ujar Gunadi SE, kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD Nganjuk dikonfirmasi Duta, Kamis (26/10) siang.

Saat ini, kata Gunadi, Kabag Umum M Bisri yang ruangan disegel oleh KPK sedang berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan bersama dengan Wakil Direktur

Pelayanan dr Laksomono Pratikno. "Sudah berangkat ke Jakarta sejak kemarin bersama Pak Laks (dr Laksomono Pratikno, red)," jelasnya.

Ketika melakukan penyegelan, lanjut Gunadi, tiga petugas KPK berpesan kepada staf RSUD agar ruangan Kabag Umum tersebut tidak disentuh. "Ada tiga orang petugas tadi malam

## Snack Mushroom Dijual secara Online

■ Sambungan dari Hal 1

### Awat, Mushroom

tuk dikonsumsi, serta 4 kilogram mushroom mentah. "Kami juga menyita barang-barang packingnya, yakni timbangan, alat press, dua buah ponsel an dua buku rekening," ujar Eko.

Jamur mushroom biasa tumbuh di kotoran gaspi. Mushroom

itu, berpesan agar ruangan yang telah disegel ini tidak diutik-utik (disentuh), sampai petugas datang kembali," paparnya.

Kedua petugas KPK, kata Gunadi lagi, hanya melakukan penyegelan tanpa membawa sesuatu. "Tidak berlangsung lama. Begitu datang langsung menyegel dan berpesan kemudian keluar. Tidak ada barang yang dibawa," jelasnya.

Sementara itu, kabar OTT KPK kepada Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman hingga saat ini belum diterima secara resmi oleh Pemkab Nganjuk. Untuk itu, Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Jadi tadi apel pukul tujuh dipimpin Pak Wabup. Beliau meminta karena proses pemeriksaan KPK ini masih berlangsung, semua ASN menjalankan tugas sesuai Tupoksi masing-masing. Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat terganggu," ujar Kabag Humas Pemkab Nganjuk Drs Agus Irianto MM kepada Duta.

Terkait dengan kabar OTT, kata Agus Irianto, Pemkab Nganjuk belum menerima keterangan secara resmi dari KPK. "Sampai dengan saat ini, pemerintah kabupaten Nganjuk belum menerima keterangan secara resmi dari KPK," jelasnya.

Namun, Agus Irianto menjelaskan bahwa sejak Selasa (24/10) lalu, Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman memang sedang berada di Jakarta. "Jadi beliau, bersama dengan bupati dan gubernur seluruh Indonesia mendapat arahan dari Presiden,"

menjadi pemberantasan pihak kepolisian sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Tito M Karnavian. Karena memang harus diakui Mushroom membuat halusinasi tinggi bagi pengunannya. Banyak kasus hingga berujung kematian disebabkan Mushroom.

Eddy menjual narkotika yang diketahui golongan I itu secara online. Pembeli menghubungi

## Tahapan Identifikasi di RS Polri Kramatjati

galami luka bakar.

Wati bingung mencari kakak iparnya yang menjadi korban ledakan pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, Banten. Wati mengatakan, kakak iparnya itu bekerja di pabrik tersebut sejak sepekan lalu. Wati mengatakan mencari Zuhro (37), setelah mendapat kabar ledakan di pabrik petasan tersebut.

Ya yang berada di rumahnya berjarak 1 km pun langsung mendatangi lokasi untuk mencari Zuhro. "Sampai sekarang belum tahu dia di mana. Belum ada informasi. Masih simpang siur," kata Wati kepada wartawan di lokasi kejadian.

Wati mengaku kerabat mendapat kabar korban-korban ledakan dibawa ke RS Mitra dan RSUD Kabupaten Tangerang. Namun, kerabat tak menemukan Zuhro. "Tadi juga sudah ke RS Mitra. Tidak ada juga. Pasien di sana laki-laki," lanjut Wati.

Wati tidak mengetahui tugas Zuhro di pabrik itu. Menurut Wati, pabrik itu baru berdiri. Bahkan banyak warga setempat yang tidak mengetahui aktivitas pabrik. Wati meminta perusahaan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

**Dibayar Rp55Ribu per Hari**  
Lain lagi cerita Diana. "Gaget, lemes, sedih, dan campur aduk," begitu kata Diana saat menden- gung pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses terbakar.

Tiga anggota keluarga Diana menjadi korban. Mereka adalah Fatimah, Lilis, dan Oni. "Kalau Oni, saya belum dapat kabar," tambah Diana.

Menurut dia, Fatimah dan Lilis baru dua minggu bekerja di gudang petasan itu. Keduanya diajak oleh Oni yang sudah sebulan bekerja. "Katanya enggak bahaya, cuma masukin kembang api saja," terangnya.

Lebih lanjut Diana mengatakan, dalam sehari karyawan gudang petasan diberi upah Rp55 ribu. "Tapi katanya target juga," ucapnya.

**Proses Identifikasi**  
Korban tewas dibawa RS Polri Kramatjati secara bergelombang

paparnya.

Mengenai keberadaan Bupati Taufiqurrahman bersama istrinya, Ita Tri Wibawati, yang dikabarkan terjaring OTT KPK, Agus Irianto lagi-lagi menyebut belum mendapat keterangan resmi dari KPK. "Yang jelas begini, sejak Selasa Pak Bupati di Jakarta. Dan, hingga saat ini Pemkab Nganjuk belum menerima keterangan secara resmi dari KPK," terangnya.

Masalah penyegelan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak kemarin Agus Irianto membenarkannya. "Yang saya tahu kemarin itu, Rabu 25 Oktober ada sejumlah ruang OPD yang disegel KPK, di antaranya ruang kepala Dinas Kantor Lingkungan Hidup (LH), Ruang Kadis Dinas Pendidikan, dan dua ruang Kabag: Ketenagaan dan Dikdas," urainya.

Untuk itu, lanjut Agus Irianto, OPD Lingkungan Hidup, dua petugas KPK yang datang langsung membawa Kepala Kantor Dinas LH Hariyanto ke Mapolres Nganjuk untuk dimintai keterangan. "Jadi ada dua petugas KPK datang. Kemudian minta ditunjukkan ruang kepala dinas. Kebetulan kemarin Kepala Dinas LH Pak Hariyanto memang ada di tempat. Deteloh ketiganya berbincaung sekitar 5 hingga 10 menit keluar menuju ke Mapolres Nganjuk untuk pemeriksaan," jabarnya.

Selanjutnya, imbuh Agus Irianto, sekitar pukul 17.00 WIB ruang Kepala Kantor LH disegel oleh KPK. Hingga berita ini dituliskan, Pemkab Nganjuk masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait kabar OTT Bupati Taufiqurrahman bersama istri serta sejumlah pejabat dan stafnya di Jakarta. ■ **rud, hud, agk**

## Jadilah Pemimpin yang Tidak 'Gembelengan'

■ Sambungan dari Hal 1

### "Negara Gundul"

daskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apakah kita sebagai warga bangsa telah merasa aman dijaga oleh negara? Siapa yang membuat jantung rakyat terus berdegup kencang setiap hari sambil menebar kebencian di antara anak negeri? Negara ini bukan tanah tak bertuan, tetapi penyedia ruang kepemimpinan untuk mengajarkan kecerdasan, bukan keculasan. Pemilihan pemimpin bukan untuk abai, apalagi pongah kepada konstituennya. Masyarakat awam sesungguhnya paham siapa pemantik situasi seperti sekarang ini. Kosmologi rakyat memberikan pekabaran yang sangat terang bahwa kemelut sosial yang berpolarisasi adanya "perang tandang yang dingding keras" ini adalah bermula dari pemberian "keadaan pelangkar hukum pengembang".

Memimpin itu bukan soal kekuatan politik semata, tetapi menyangkut kedalaman ruhani, kelapangan hati, dan keluasan pikir. Plato (427-347 SM) di berbagai karyanya (Laches, Protagoras, Phaedo, Republik, Meno, Parmenides, Theaetetus dan Undang-undang) merekomendasikan agar kekuasaan itu dipegang oleh seorang filosof, karena filosof memiliki cakrawala pandang yang komprehensif dan menampung segala beban rakyatnya. Bagaimana pun peringkat rakyat itu.

Pemikiran filosofis diajarkan sebagai esensi bangunan agar suatu rezim "negara kota" sesuai dengan makna dasar had-irnya sebuah negara. Dalam lingkup yang demikian benarlah apa yang digagas Plato. Pemimpin yang mengerti filsafat Pancasila dan kandungan UUD 1945 pun pasti menjaga ketertiban. Kalau kekuasaan negara justru "beternak dendam", berarti pandangan filsafatnya tidak sejalan dengan falsafah negaranya. Ini membahayakan negara.

Terhadap situasi sekarang ini sebagai penenang pikir, sudah melantunkan lagu dolanan kreasi budaya Kanjeng Sunan Kalijaga diakhir abad ke-14 yang telah mendapatkan penghargaan C Hardja Soebarta (1905-1986), Gundul-gundul Pacul:

*Gundul gundul pacul kul gembelengan  
Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan  
Wakul glempang segane dadi sak latar  
Wakul glempang segane dadi sak latar*

*Gundul gundul pacul kul gembelengan  
Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan  
Wakul glempang segane dadi sak latar  
Wakul glempang segane dadi sak latar*

Apa maknanya? Sang gundul adalah rakyat yang dengan menggul segala kepolosannya harus berbekal pacul. Cangkuk adalah perlambang daya juang untuk menyangkul, untuk menggali, untuk menafkahi, untuk berpenghidupan yang disindir gembelengan. Gembelengan merupakan gerak dinamis yang mempermainkan, dan apa akibat dari menggembelengan rakyat (gundul) dengan

perabot kebutuhan ekonominya (cangkuk), telah dijawab pada bait berikutnya. Negara tentu tidak boleh "gembelengan", apalagi sambil "menyembahnyembah investor yang main tabrak hukum negara".

Nyunggi berarti menjunjung tinggi di atas kepala dengan meletakkan wakul (bakul) sebagai wadah atau forma cita-cita rakyat, bejana amanat rakyat, tempat daulat tertinggi. Bagaimana implikasi tindakan menjunjung amanat rakyat dengan gembelengan? Tempayan kerakyatan (wakul) itu akan terjatuh dengan konsekuensi segane (nasi) tumpah memenuhi jalanan, membanting halaman rumah (dadi sak latar). Nasi boleh 'diwerdikan' kumpulan rakyat atau ekspresi cita-cita yang diwadahi dalam negara (NKRI). Kepentingan rakyat harus terus diselamatkan dalam "wakul NKRI".

Gembelengan harus dicegah seberapa pun beratnya, sesulit apa pun medannya, segelap apa pun ruangnya, selicin apa pun tangga pencapaiannya. Pemimpin negara maupun yang Ormas keagamaan dilarang gembelengan, karena hal itu mengakibatkan guncangan. Meletakkan rakyat di atas kepala adalah pilihan dari jabatan yang mengerti hakikat supremasi demokrasi. Kalau pemimpin gembelengan, maka tanggung jawab berikutnya yang akan muncrat: Wakul glempang segane dadi sak latar.

Oh... oh... simaklah. Sebuah tembang telah menunjukkan betapa keagungan pesan yang disampaikan kepada siapa saja yang menduduki posisi kekuasaan negara dan "tahtah agama". Tembang itu menghentak dengan bahasa simbolik, serta sangat paripurna: wakul

glempang segane dadi sak latar - wakul glempang segane dadi sak latar. Pengulangan ini menjadi pengingat tanpa sekat bahwa pemimpin yang menyanggi (menjunjung tinggi) tidak boleh main-main dengan suara rakyat yang disunggingnya (sebagai mahkota). Pemerintah harus rela bahkan wajib dengan kekuasaan yang dititipkan kepadanya untuk terus-menerus mencangkuk, menyuburkan ladang rakyat, yaitu memberi perlindungan kepadanya.

Saya percaya bahwa apabila kita tidak dapat menggali selangka bongkahan kearifan ajaran kepemimpinan dari leluhur, bolehlah memungut sebaris liriknya. Asalkan mampu menggerak kemuliaan ajaran bagi rakyatnya. Puncuran yang meneteskan air kebijaksanaan agar penguasa jujur pada tugasnya amatlah berharga. Sebagaimana Filusuf Plato dalam buku dialogis klasiknya, Republik yang mengajarkan bahwa kepemimpinan orang jujur jauh lebih menguntungkan. Kau benar Plato. Dan dalam ranah Sirah Nabawiyah kami, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saw yang hadir sejak mulanya adalah sebagai utusan yang bergelar al-amin dan sempurna dengan karakter utamanya: shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Inilah pandom kepemimpinan teladan paripurna. Kepada calon gubernur Jatim, bersumpahlah dalam spirit imanmu dan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2017 esok, untuk menjadi pemimpin yang tidak gembelengan.

\* Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga